



ISU DAN TANTANGAN EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Wahyu Sihab

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
wahyusihab693j@gmail.com

Shafa Kamalia

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
shafakamaliap@gmail.com

Syaifulloh Yusuf

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
syaifulloh.yusuf@uii.ac.id

Abstract: This study aims to comprehensively analyze the main issues and challenges in evaluating the education system in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a *descriptive-analytical* literature review method on national education evaluation practices. The results of the study show that, first, there is a gap between policy design and implementation in the field. Second, the quality and capacity of evaluators are not yet fully adequate in carrying out authentic assessment and evaluation. Third, character education evaluation instruments are still weak and often administrative in nature. This study emphasizes that strengthening the education evaluation system in Indonesia requires a more integrative and systematic approach, including improving the capacity of evaluators, the role of teachers, the development of evaluation instruments, and government intervention through affirmative policies, such as the ADEM and Merdeka Belajar scholarship programs.

Keywords: Education Evaluation, Character Education, Evaluator Capacity, Education Policy, Digital Technology.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu dan tantangan utama dalam evaluasi sistem pendidikan di Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan deskriptif-analitis terhadap praktik evaluasi pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Kedua, kualitas dan kapasitas evaluator belum sepenuhnya memadai dalam melaksanakan penilaian autentik dan evaluasi. Ketiga, instrumen evaluasi pendidikan karakter masih lemah dan sering bersifat administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem evaluasi pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan sistematis, meliputi peningkatan kapasitas evaluator, peran guru, pengembangan instrumen evaluasi serta intervensi Pemerintah melalui kebijakan afirmatif, seperti program beasiswa ADEM dan Merdeka Belajar.

Kata kunci: Evaluasi pendidikan, Pendidikan karakter, Kapasitas evaluator, Kebijakan pendidikan, Teknologi digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan nasional dalam dua dekade terakhir menandai transformasi besar dalam kebijakan, mulai dari penyempurnaan kurikulum hingga pendidikan karakter sebagai landasan utama dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia.¹ Namun, meskipun terjadi perubahan tersebut, evaluasi pendidikan yang umumnya merupakan alat terpenting untuk memastikan bahwa siswa belajar tetap berjalan tanpa hambatan saat pemerintah menerapkan kebijakannya. Sebagai proses sistematis, evaluasi belum sepenuhnya menjadi praktik di lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun lembaga pendidikan tinggi.²

Beberapa penelitian terdahulu dan diskusi akademis serta laporan menunjukkan bahwa evaluasi dan hambatan masih menjadi proses yang akan selalu diperbaharui pemerintah, temuan-temuan tersebut didasarkan pada implementasi proses evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Winaryo pada 2020 dalam “*Evaluation of the Program for Quality and Accessible Education at the Primary Education Level in Central Kalimantan Province*” menunjukkan bahwa secara umum, implementasi program pendidikan berkualitas dan terjangkau di tingkat pendidikan dasar masih belum optimal, disebabkan oleh implementasi strategi perencanaan yang tidak efektif, sistem jaminan mutu, standar pendidikan nasional, dan standar layanan minimum.³ Meskipun peraturan telah mengakui penilaian sebagai komponen krusial dalam pendidikan, banyak sekolah masih menggunakan metode penilaian tradisional yang didasarkan pada faktor kognitif.⁴ Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sarana pendukung dan kapasitas tenaga pendidik yang belum sepenuhnya tersedia di setiap wilayah di Indonesia. Akibatnya, tujuan penilaian untuk menilai secara akurat kemampuan, kepribadian, dan kemajuan siswa belum tercapai.

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pendidikan nasional terus meningkat terutama dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik.⁵ Kemajuan sosial, perkembangan teknologi digital, dan keterampilan abad ke-21 membuat sistem pendidikan menjadi lebih fleksibel dan responsif.⁶ Dalam konteks ini, evaluasi harus menjadi alat strategis yang dapat menyediakan data objektif tentang efektivitas pengajaran, relevansi kurikulum, dan pengembangan karakter siswa.⁷ Namun kenyataannya, praktik evaluasi di lapangan seringkali tidak memenuhi standar ideal yang diharapkan.

Kebijakan dan implementasi terlihat pada beberapa aspek penting. Pertama, pemahaman guru dan siswa tentang tes autentik masih kurang, sehingga banyak alat evaluasi tidak cukup mencerminkan pertumbuhan keseluruhan siswa.⁸ Kedua, kemampuan penilai, baik guru, wali, maupun kepala sekolah, harus mampu menangani kompleksitas evaluasi pendidikan modern, termasuk karakter dan keterampilan *non-kognitif*.⁹ Ketiga, alat evaluasi yang digunakan lebih

¹ I. Wayan Indra Praekanata et al., *Menelusuri Arab Pendidikan: Dinamika Dan Inovasi Kurikulum Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

² Slamet Winaryo, “Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Dan Terakses Jenjang Pendidikan Dasar Di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Equity In Education Journal* 2, no. 1 (March 20, 2020): 1–10, doi:10.37304/ej.v2i1.1679.

³ Ibid.

⁴ Desy Damayanti and Ahmad Khairul Nuzuli, “Evaluasi Efektivitas Penggunaan Teknologi Komunikasi Dalam Pengajaran Metode Pendidikan Tradisional Di Sekolah Dasar,” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 208–19.

⁵ Riska Oktafiana, Fathiyani Fathiyani, and Musdalifah Musdalifah, “Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan,” *Jurnal Mappesona* 3, no. 3 (2020).

⁶ Burhan Nudin et al., “The Role Of Parents And Families In Children’s Education In The Digital Era,” *Linguanusa: Social Humanities, Education and Linguistic* 2, no. 1 (2024): 9–22.

⁷ Nadia Yusri et al., “Peran Penting Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islami,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 12–12.

⁸ Devi Radnasari and Siti Fatonah, “Obstacles and Challenges in Implementing Authentic Assessment in Elementary Madrasah,” *International Journal of Basic Educational Research* 2, no. 1 (February 28, 2025): 21–25, doi:10.14421/ijber.v2i1.8800.

⁹ Damayanti and Nuzuli, “Evaluasi Efektivitas Penggunaan Teknologi Komunikasi Dalam Pengajaran Metode Pendidikan Tradisional Di Sekolah Dasar.”



berfokus pada validitas, reliabilitas, dan relevansi, terutama saat mengevaluasi sifat karakter dan usia 21.¹⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan komprehensif dalam mengevaluasi aspek praktis pendidikan.¹¹ Selain itu, teknologi digital yang semakin canggih menimbulkan masalah baru yang sulit ditangani oleh guru atau lembaga pendidikan. Selain meningkatkan evaluasi, teknologi terkadang menciptakan bias dalam analisis atau penerapan yang berdampak negatif pada hasil penilaian. Oleh karena itu, hasil evaluasi perlu dipertimbangkan secara sistematis.

Berdasarkan isu yang telah disebutkan, penelitian tentang topik dan tantangan evaluasi sistem pendidikan Indonesia sangat penting sebagai sarana untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang realitas evaluasi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan antara implementasi dan kebijakan, tetapi juga secara kritis menganalisis kualitas evaluator, efektivitas alat evaluasi karakter, dan dampak perkembangan teknologi digital terhadap praktik evaluasi. Kebaharuan penelitian didasarkan pada cara menganalisis kebijakan, kapasitas evaluator, dan dinamika teknologi dalam satu rentang komprehensif, yang menghasilkan perspektif yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan penelitian ilmiah tradisional.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan sistem evaluasi pendidikan di Indonesia, serta menjadi acuan strategis bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitis* berbasis studi pustaka¹². Pendekatan penelitian ini dipilih karena bersifat konseptual dan normatif yang menjelaskan Sistem Evaluasi Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hubungan antara implementasi dan kebijakan, tetapi juga secara kritis menganalisis kualitas evaluator, efektivitas alat evaluasi karakter, dan dampak perkembangan teknologi digital terhadap praktik evaluasi. Proses penelitian melibatkan analisis berbagai karya dan sumber ilmiah yang relevan, seperti buku-buku tentang evaluasi manajemen, dokumen kurikulum, dan artikel jurnal nasional dan internasional yang terkemuka yang membahas hubungan antara evaluasi pendidikan, tantangan pendidikan abad 21, manajemen transformasi dan peran Guru.

Analisis ini berfokus pada aspek-aspek evaluasi dan manajemen, yaitu telaah terhadap sistem pendidikan dan arah proses pendidikan, baik dalam kerangka transendensi dan moralitas Islam maupun dalam orientasi humanis dan nasionalis yang menjadi dasar Pendidikan.¹³ Oleh karena itu data dikumpulkan melalui dokumentasi dan tinjauan literatur yang mencakup sumber primer dan sekunder, seperti peraturan pemerintah tentang kurikulum, buku teks pendidikan Islam, dan artikel ilmiah yang membahas evaluasi, manajemen dan pendidikan karakter. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya berusaha menggambarkan isi dan arah dalam menganalisis implikasinya bagi praktik pendidikan.

¹⁰ Ike Sylvia, Syafri Anwar, and Khairani Khairani, "Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik Berbasis Pendekatan Authentic Inquiry Learning Pada Mata Pelajaran Sosiologi Di Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 2 (December 31, 2019): 103–20, doi:10.24036/scs.v6i2.162.

¹¹ Ni Kadek Armini, "Evaluasi Metode Penilaian Perkembangan Siswa Dan Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar," *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 98–112.

¹² Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-Nuur* 13, no. 2 (2023), doi:<https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>; Jim Hoy Yam, "Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian," *EMPIRE* 4, no. 1 (2024): 61–71, doi:<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/EM/article/view/4730?utm>.

¹³ Mohammad Zamroni, *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (IRCISOD, 2022), doi:https://books.google.co.id/books/about/Filsafat_Komunikasi.html?id=ialcEAAAQBAJ&redir_esc=y.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi pendidikan di Indonesia.

Sistem pendidikan Indonesia terus berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era modern. Pemerintah telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, mulai dari pengembangan kurikulum hingga implementasi sistem evaluasi pendidikan nasional.¹⁴ Tujuan dari upaya-upaya ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara relevan, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan siswa.

Namun, ketika kebijakan yang disebutkan di atas diterapkan, berbagai realitas muncul yang tidak selalu sejalan dengan tujuan normatif pembentukan kebijakan tersebut. Perbedaan ini dapat dilihat, misalnya, dalam penerapan kurikulum Merdeka dan analisis karakter, yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya pendidikan di antara provinsi-provinsi, yang juga disebutkan dalam laporan BPS bahwa sebagian besar provinsi masih memiliki fasilitas sekolah yang tidak memadai.¹⁵

Hubungan antara kebijakan pendidikan dan implementasinya di lapangan merupakan komponen kunci dalam sistem pendidikan Indonesia. Meskipun pemerintah secara rutin melakukan evaluasi modern, seperti penilaian kurikulum Merdeka atau penilaian karakter, kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa tidak semua penilaian tersebut akurat.¹⁶ Salah satu penyebab utama hal ini adalah infrastruktur dan distribusi sarana yang buruk, misalnya, data dari BPS menunjukkan bahwa fasilitas sekolah di berbagai provinsi masih belum memadai.

Banyak sekolah di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dasar, seperti listrik, guru yang berkualitas tinggi, atau ruang kelas yang layak, yang menghambat pengembangan praktik penilaian yang ideal.¹⁷ Kesenjangan implementasi juga penting dari perspektif data pendidikan. Misalnya, BPS (melalui Susenas) dan Kemendikbud memiliki metode pengumpulan data yang berbeda dalam menentukan indikator pendidikan¹⁸. BPS menggunakan survei rumah tangga, sementara Kemendikbud menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ketidaksesuaian dan kurangnya sinkronisasi data merupakan hambatan nyata dalam pemantauan kualitas dan akses pendidikan secara nasional.

Salah satunya contohnya penggunaan fasilitas kendaraan pribadi serta pengeluaran dana terhadap dana pendidikan, karena Disparitas biaya pendidikan terlihat pada setiap jenjang menurut komponen terutama terlihat pada komponen biaya SPP/UKT. Rata-rata total biaya yang dikeluarkan peserta didik pada setiap jenjang di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada jenjang SD sederajat, rata-rata total biaya pendidikan yang dikeluarkan peserta didik di wilayah perkotaan mencapai 5,40 juta rupiah, hampir dua kali lipat rata-rata total biaya jenjang SD sederajat di wilayah perdesaan (3,40 juta rupiah).

¹⁴ Agus Suherman, Yudi Firmansyah, and Suherman Suherman, "Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dan Efisien Dalam Pendidikan Di Era 5.0," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 2066–73.

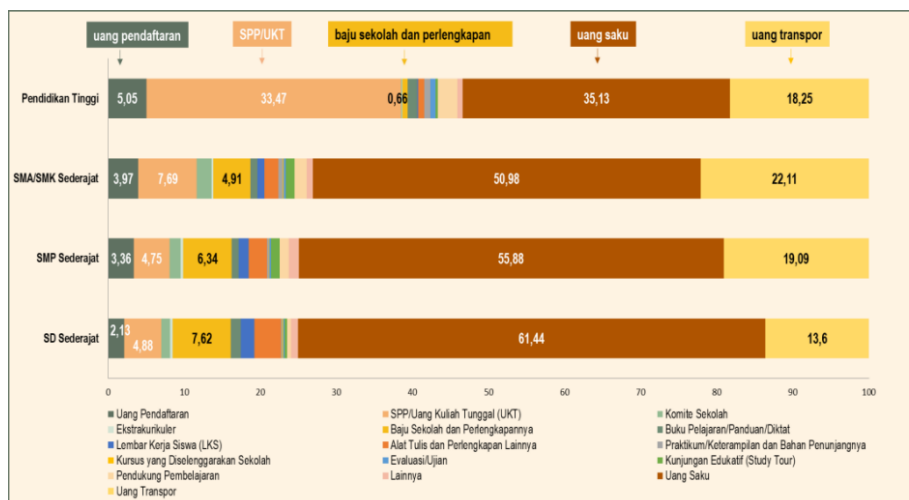
¹⁵ Emily Zakia Emily Zakia, "Pendidikan di Indonesia Belum Merata, Begini Sebaran Sekolah Menurut BPS - GoodStats," Oktober pukul 19.20 WIB 2025, <https://goodstats.id/article/sebaran-sekolah-di-indonesia-masih-belum-merata-ini-datanya-wUWy1?utm>.

¹⁶ Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), "Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan | Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan | Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah*, March 27, 2024, <https://bskap.kemdikbud.go.id/berita-detail/85?utm>.

¹⁷ Tri Meilani Ameliya, "Memperjuangkan Pendidikan Yang Setara Di Daerah 3T - ANTARA News," Rabu, Mei 13:36 WIB 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4832069/memperjuangkan-pendidikan-yang-setara-di-daerah-3t?utm>.

¹⁸ Emily Zakia Emily Zakia, "Pendidikan di Indonesia Belum Merata, Begini Sebaran Sekolah Menurut BPS - GoodStats."



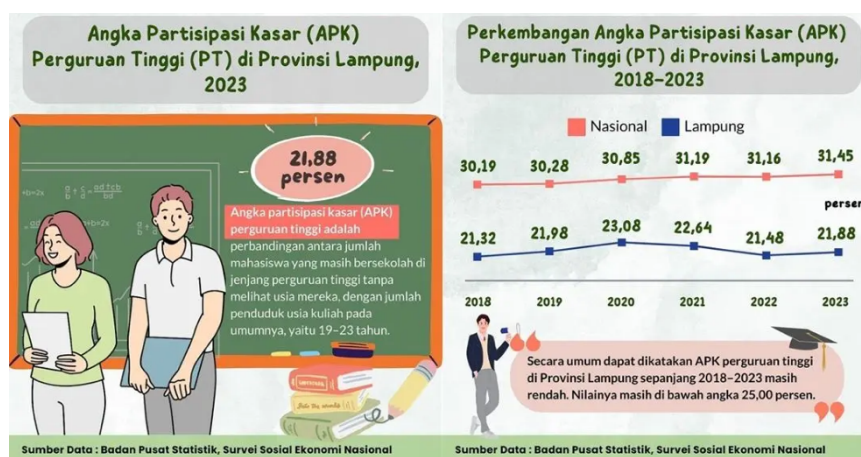


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2024

Gambar 1. Persentase Komponen Biaya Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2023/2024 (sumber: BPS Statistik Penunjang Pendidikan).

Upaya kebijakan afirmatif seperti sertifikasi guru dan distribusi tunjangan memang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, terutama di daerah-daerah yang tertinggal.¹⁹ Namun, kompetensi guru di beberapa wilayah masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masalah telah diidentifikasi, “nilai tambah” yang dimaksud belum sepenuhnya terwujud melalui evaluasi yang komprehensif dan konsisten.

Ketimpangan ini semakin terlihat dari kebijakan akses pendidikan tinggi. Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan tinggi telah diterapkan, data terbaru menunjukkan bahwa APK untuk pendidikan tinggi di Indonesia masih cukup rendah. Contohnya dari salah satu provinsi di Indonesia, Lampung memiliki pertumbuhan APK antara tahun 2018 dan 2023 masih cukup rendah. Nilainya masih di bawah 25.000 persen. Pada tahun 2023 APK perguruan tinggi mencapai 21,88 persen, sementara pada tahun 2022, APK perguruan tinggi mencapai 21,48 persen



Gambar 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada perguruan tinggi di Provinsi Lampung 2023 (sumber: BPS National Socioeconomic Survey)

¹⁹ Fikrial Nurfaizin and Arif Fakhir Firdaus, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.” Manajerial,” *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 2 (June 13, 2025): 310–18, doi:10.51878/manajerial.v5i2.5384.



Indikator ini digunakan untuk menunjukkan berapa banyak orang yang biasanya mengikuti tingkat pendidikan tertentu. Untuk menunjukkan kemampuan sistem pendidikan dalam mendukung siswa dari kelompok usia sekolah saat ini. APK adalah indikator terpenting untuk mengukur jumlah siswa yang terdaftar di sekolah-sekolah di berbagai lembaga pendidikan.

Masih rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi atau APK PT di Indonesia disoroti dalam Tajuk Rencana Kompas APK PT pada 2024 adalah 39,37 persen, di bawah rata-rata global yang 40 persen. Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia (43 persen), Thailand (49,29 persen), dan Singapura (91,09 persen). Kendala utamanya faktor ekonomi, yakni biaya kuliah yang tinggi.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan akses pendidikan belum dievaluasi secara menyeluruh di lapangan, meskipun dievaluasi secara positif dari sisi dampak jangka panjang.

Dari perspektif evaluasi pendidikan, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi ini memiliki kelemahan serius jika kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik, data evaluasi yang diperoleh tidak akan representatif, maka hal ini akan mendorong pembuatan kebijakan untuk melakukan intervensi yang tepat guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah yang paling membutuhkan.²¹

Kualitas dan Kapasitas Tenaga Evaluator

Komponen kunci yang menentukan efektivitas sistem evaluasi pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun nasional, adalah kualitas dan kapasitas evaluator.²² Meskipun proses evaluasi telah menerima banyak masukan baik dari kemampuan guru, administrator sekolah, dan kepala sekolah sebagai bagian dari proses evaluasi namun belum sepenuhnya berkembang sesuai dengan tuntutan. Banyak guru masih kesulitan dalam mengevaluasi, hal ini menghadirkan penilaian autentik yang mencakup segala hal mulai dari portofolio dan pengamatan kinerja hingga proyek kolaboratif dan analisis karakter.²³ Ketidaksiapan ini menimbulkan masalah, mulai dari ketidaktepatan alat penilaian hingga minimnya kemampuan untuk memantau perkembangan siswa secara menyeluruh.

Masalah kompetensi evaluator ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pengembangan profesional dan pelatihan.²⁴ Penelitian yang dilakukan Faizatul Husna dan Sari dalam “*Guru sebagai Peneliti: Menjelajahi Kompetensi dan Tantangan Guru Bahasa Inggris di Sekolah Perkotaan dan Pedesaan di Aceh*” menjelaskan bahwa beberapa faktor-faktor yang mendasari terhadap perkembangan guru dipedesaan baik meliputi waktu yang terbatas akibat beban mengajar yang berat, kebutuhan akan dukungan rekan sejawat dalam kegiatan penelitian, fasilitas sekolah yang tidak memadai, dan pelatihan yang tidak memadai.²⁵

Hampir semua pelatihan yang tersedia bersifat sekali saja dan tidak berkelanjutan, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak cukup kuat untuk mendukung praktik evaluasi secara berarti. Kondisi ini disebabkan oleh administrator yang sangat ketat, sehingga waktu

²⁰ Satryo Soemantri Brodjonegoro, “Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi,” February 20, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/angka-partisipasi-kasar-pendidikan-tinggi?utm>.

²¹ Muhammad Taali, Arif Darmawan, and Ayun Maduwinarti, *Teori Dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²² Yosafat Maheswara Gultom, Fachri Syahputra, and Syahril Syahril, “Pengaruh Evaluasi Pembelajaran Terhadap Kualitas Pembelajaran Guru Di Sekolah Dasar,” *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 3 (May 31, 2024): 8–8, doi:10.47134/pgsd.v1i3.543.

²³ Radnasari and Fatonah, “Obstacles and Challenges in Implementing Authentic Assessment in Elementary Madrasah.”

²⁴ Ita Purnamasari, St Asriati, and Herlina Daddi, “Analyzing Teachers’ Implementation of Authentic Assessment in English Lesson at SMKN 4 Bulukumba,” *Journal of Language Testing and Assessment* 3, no. 1 (June 30, 2023): 11–19, doi:10.56983/jlta.v3i1.206.

²⁵ Faizatul Husna and Desi Ratna Sari, “Teacher As Researcher: Exploring Competencies And Challenges Of Urban And Rural English School Teachers In Aceh,” *Journal of English Language and Education* 9, no. 4 (July 31, 2024): 59–69, doi:10.31004/jele.v9i4.530.



yang dibutuhkan untuk memahami dan mengelola evaluasi berkualitas sangat terbatas.

Selain faktor struktural, sistem pengawasan dan pemantauan pendidikan tidak sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas evaluator. Pengawas dan kepala sekolah seringkali lebih menekankan pada tugas administratif daripada tugas pedagogis.²⁶ Akibatnya, pola lama yang linear tetap berlanjut dalam evaluasi praktik memberikan soal, mengoreksi, memberi nilai, dan selesai. Evaluasi tidak berhenti menjadi proses reflektif yang membantu guru meningkatkan strategi pengajaran mereka berdasarkan hasil penilaian. Dalam hal ini Asesmen formatif, atau asesmen berdasarkan perkembangan sifat-sifat yang tidak diinginkan, dilakukan secara efektif tanpa bantuan evaluator yang kompeten.

Kekurangan kompetensi evaluator juga berdampak jangka panjang pada kualitas data yang dikumpulkan.²⁷ Di sekolah-sekolah yang kurang berkembang, analisis data seringkali tidak akurat baik karena alat ukur yang tidak valid, proses pengamatan yang subjektif, atau pemahaman yang abstrak tentang sifat-sifat karakter. Akibatnya, hasil evaluasi menjadi bias dan tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi hasil pendidikan. Jika kapasitas evaluator rendah, maka semua aspek sistem evaluasi akan terpengaruh: pendidikan akan lambat, intervensi pemerintah tidak efektif, dan kebijakan peningkatan mutu sulit akan gagal.

Kemampuan evaluator dalam menggunakan teknologi digital juga erat kaitannya dengan transformasi pendidikan di abad ke-21. Literasi digital yang belum secara luas diterima di kalangan guru diperlukan untuk evaluasi berbasis aplikasi, penilaian daring, dan analisis data. Banyak guru memahami teknologi hanya sebagai alat administratif, bukan sebagai alat evaluasi yang dapat mempercepat proses belajar.²⁸ Tren literasi digital ini semakin menonjolkan perbedaan antara kurikulum modern dan praktik evaluasi yang digunakan di kelas.

Mengingat kompleksitas ini, analisis kualitas dan kapasitas evaluator sangat relevan. Penelitian tentang topik ini memberikan ilustrasi yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang sering digunakan dalam evaluasi pendidikan. Kemunculan kajian baru ini dapat ditelusuri kembali ke pendidikan integratif, yang tidak hanya menekankan kompetensi guru dalam konteks pedagogis tetapi juga menghubungkannya dengan struktur pendidikan, distribusi siswa, pembelajaran digital, dan praktik evaluasi sekolah. Analisis semacam ini lebih mendalam daripada penelitian sebelumnya yang terutama berfokus pada evaluasi aspek teknis tanpa mempertimbangkan lingkungan.

Oleh karena itu, meningkatkan kualitas dan keterampilan evaluator bukan hanya persyaratan teknis tetapi juga strategis. Evaluator yang kompeten akan dapat menggunakan evaluasi sebagai alat refleksi, panduan untuk meningkatkan pengajaran, dan ukuran kualitas pendidikan secara keseluruhan. Namun, karena kompetensi ini masih berkembang, hubungan antara praktik evaluasi ideal dan teknik evaluasi praktis akan tetap menjadi komponen kunci dalam sistem pendidikan Indonesia.

Instrumen Evaluasi Pendidikan Karakter yang Lemah

Dunia pendidikan memegang peranan penting pada pembentukan karakter peserta didik, hal ini juga menunjukkan perihwal perkembangan karakter yang di dominasi pada konsep pendidikan yang tidak sekadar validasi pada ilmu, namun juga sebagai pencegahan dari pada degradasi moral yang kian marak di masyarakat.²⁹ Hal ini menjadi sebuah patokan bagi pendidikan dalam mengembangkan proses pembelajaran yang dituju tidak semata-mata berorientasi pada pengembangan kapasitas intelektual, melainkan juga berperan fundamental dalam pembentukan karakter.

²⁶ Rodhinal Mochtar and Eka Diana, "Strategi Supervisi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Lembaga Pendidikan," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 395–407.

²⁷ Taali, Darmawan, and Maduwinarti, *Teori Dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan*.

²⁸ Damayanti and Nuzuli, "Evaluasi Efektivitas Penggunaan Teknologi Komunikasi Dalam Pengajaran Metode Pendidikan Tradisional Di Sekolah Dasar."

²⁹ Anggi Rambe et al., "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum 2013," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 21 (October 31, 2024): 238–49, doi:10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21(2).16354.



Esensi utama pendidikan terletak pada upaya membekali individu dengan wawasan nilai-nilai karakter, sehingga generasi muda memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika perubahan global yang kompleks. Hal ini sejalan dengan landasan yuridis Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan keseimbangan antara kompetensi akademik dan penguatan karakter peserta didik secara holistik.³⁰

Secara normatif, pendidikan karakter bertujuan mencetak generasi penerus yang mampu menjunjung tinggi etika dan moralitas demi keberlangsungan kesejahteraan bangsa. Namun, idealisme ini dihadapkan pada paradoks realitas empiris berupa degradasi moral yang signifikan di kalangan pelajar. Meningkatnya prevalensi perilaku menyimpang, seperti ketidakjujuran akademik, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja menjadi indikator yang merefleksikan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai karakter pada generasi muda.³¹ Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi BKKBN, mengatakan bahwa 63% remaja Indonesia pernah melakukan seks bebas. Sedangkan remaja korban narkoba di Indonesia ada 1,1 juta orang atau 3,9% dari total jumlah korban.³²

Atas berbagai fenomena tersebut, sorotan masyarakat terhadap berbagai kasus degradasi moral pada generasi muda semakin tajam. Meskipun pendekatan hukum dan regulasi ketat kerap diajukan sebagai solusi, namun para ahli meyakini bahwa pendidikan merupakan jalur preventif yang paling efektif. Seperti disebutkan di awal, pendidikan tidak sekadar mentransfer ilmu, namun berfungsi membangun fondasi moral pada generasi mendatang, meskipun dampaknya memang memerlukan investasi dalam jangka waktu yang panjang.

Merespons urgensi tersebut, sejak tahun 2010 pemerintah telah menetapkan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sebagai kebijakan prioritas nasional.³³ Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan menghadapi tantangan yang cukup serius, terutama dalam hal penilaian atau evaluasi. Berbeda dengan kemampuan kognitif yang bisa diukur secara objektif melalui tes, evaluasi karakter jauh lebih bersifat kompleks karena sifatnya multidimensi yang mencakup keterpaduan antara pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Oleh sebab itu, sistem evaluasi harus dirancang dengan sangat cermat agar mampu memotret ketiga aspek tersebut secara akurat.

Dalam proses pendidikan, evaluasi karakter dapat dipahami sebagai rangkaian proses sistematis, mulai dari pengumpulan, analisis, hingga interpretasi data untuk memotret perkembangan nilai karakter peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikan karakter yang telah dilaksanakan.³⁴ Evaluasi karakter sebenarnya memegang peran yang sangat vital, sebab ia tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur bagi guru untuk melihat sejauh mana program dapat berjalan secara efektif, tetapi juga menjadi alat diagnosis untuk mendeteksi aspek karakter siswa yang masih perlu untuk dibenahi. Lebih dari itu, evaluasi ini penting untuk mengawal perkembangan kepribadian siswa secara berkelanjutan demi terbentuknya kepribadian yang utuh.³⁵

Namun sayangnya, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa evaluasi pendidikan karakter sering kali terhenti sebatas formalitas administrative dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ketiadaan instrument penilaian yang spesifik menyebabkan guru

³⁰ Diana Yusni et al., "Analyze the Crisis of Students' Character Values and Innovative School Strategies in Overcoming the Challenge," *The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences*, July 1, 2024, 52–60, doi:10.55549/epess.791.

³¹ Yuyu Asih Marlina, Yusuf Tri Herlambang, and Tatang Muhtar, "Urgensi Pendidikan Karakter Berbasis Pedagogik Profetik: Sebuah Pendekatan dalam Menanggulangi Krisis Moral Siswa," *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 10, no. 1 (January 12, 2025): 753–58, doi:10.51169/ideguru.v10i1.1424.

³² Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga* (Elex Media Komputindo, 2014).

³³ Khairun Nisa et al., "Pengembangan Instrumen Penilaian Karakter Untuk Siswa Sekolah Dasar (SD)," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 6, no. 1 (2021): 102–7.

³⁴ Dharmas Kesuma, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah* (PT Remaja Rosdakarya, 2011).

³⁵ Elvira Wanda RI, Naufali Farhanillah, and Akhmad Affandi, "Evaluasi Pembelajaran Karakter Di Sekolah," *JIIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 9 (2025): 11062–71.



kesulitan mengukur perkembangan siswa secara akurat, sehingga hasil penilaian menjadi bias atau timpang tindih dengan aspek sikap maupun keterampilan.³⁶ Kondisi ini terkonfirmasi oleh temuan Salirawati (2021), yang menegaskan bahwa kendala utama di sekolah adalah ketiadaan pedoman operasional yang mampu menuntun pelaksanaan evaluasi secara efisien dan efektif. padahal, keberadaan model evaluasi yang tepat sangat krusial untuk menjangkau data valid mengenai kondisi karakter siswa agar tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan secara presisi.³⁷

Benang merah permasalahan ini semakin terlihat jelas melalui penelitian terbaru R.I Wanda, dkk., (2025), yang menyoroti bahwa sekolah masih terjebak dalam rutinitas administrasi tanpa menyentuh substansi perkembangan karakter siswa.³⁸ Hal ini pun diperkuat oleh Rambe, dkk., (2024), yang menambahkan bahwa penilaian karakter saat ini cenderung subjektif dan belum terintegrasi dengan baik dalam sistem akademik, sehingga guru semakin sulit memperoleh gambaran objektif mengenai profil peserta didik.³⁹

Subjektivitas tersebut berakar pada praktik di mana guru kerap melakukan observasi tanpa dukungan rubrik penilaian yang memadai. Fenomena ini terjadi akibat minimnya pemahaman guru mengenai konstruksi instrumen sikap, serta adanya simplifikasi pandangan bahwa penilaian afektif cukup dilakukan melalui pemantauan tingkah laku harian atau catatan indiscipliner semata. Akibatnya, evaluasi yang berjalan berjalan gagal memotret perkembangan karakter peserta didik secara komprehensif.⁴⁰

Terlepas dari kompleksitas tantangan tersebut, bukan berarti evaluasi karakter mustahil untuk dilakukan. Kuncinya terletak pada pemahaman bahwa evaluasi ini adalah upaya memantau progresi perilaku siswa secara berkala. Prinsip fundamental yang harus dipegang adalah menghindari penilaian sesaat (*one-shot evaluation*). Sebaliknya, proses ini menuntut observasi yang berkelanjutan dan konsisten, agar perilaku siswa yang sesungguhnya dapat teridentifikasi secara utuh.⁴¹

Dampak Globalisasi dan Teknologi Digital Serta Strategi dan Arah Perbaikan Evaluasi Sistem Pendidikan

Globalisasi merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, yang berlangsung di semua bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Era globalisasi yang ditandai oleh konektivitas yang luas dan percepatan perkembangan teknologi, telah menggeser paradigma pendidikan secara signifikan.⁴² Transformasi ini berdampak langsung pada proses pembelajaran, desain kurikulum, serta kompetensi yang diperlukan untuk menjawab tantangan global. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan menghasilkan terciptanya platform pembelajaran yang lebih adaptif dan hemat biaya, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi siswa di berbagai bidang. Selain itu, penerapan teknologi dalam pendidikan mendorong terciptanya pengalaman belajar yang lebih menarik dan personal, sehingga memungkinkan siswa untuk maju sesuai dengan kecepatannya sendiri dan sesuai dengan preferensi unik. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.⁴³

³⁶ Das Salirawati, "Identifikasi Problematika Evaluasi Pendidikan Karakter Di Sekolah," *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains* 4, no. 1 (2021): 17–27.

³⁷ Ibid.

³⁸ RI, Farhanillah, and Affandi, "Evaluasi Pembelajaran Karakter Di Sekolah."

³⁹ Rambe et al., "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum 2013."

⁴⁰ Das Salirawati, "Identifikasi Problematika Evaluasi Pendidikan Karakter Di Sekolah," *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains* 4, no. 1 (April 1, 2021): 17–27, doi:10.24246/juses.v4i1p17-27.

⁴¹ Kesuma, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah*.

⁴² Imam- Fauzi, Imam Syafe'i, and Amiruddin Amiruddin, "Character Education: Its Implementation at Islamic Boarding School | Journal of Advanced Islamic Educational Management," May 31, 2023, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/JAIEM/article/view/15797?utm>.

⁴³ Suci Frisnoiry, "Transformasi Pendidikan Menuju Literasi Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Pendidikan Matematika Malikussaleh* 4, no. 1 (2024): 53–63.



Namun, penerapan inovasi digital dalam pendidikan tidak terlepas dari tantangan. Kesenjangan akses terhadap teknologi, kemampuan adaptasi tenaga pengajar, dan keamanan data menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Perubahan teknologi yang cepat mengharuskan para pendidik dan lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran baru yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Sviri (2024) dalam penelitiannya mengemukakan hal serupa, era globalisasi mengubah pola pembelajaran secara signifikan. Tuntutan global mendorong pergeseran paradigma pembelajaran yang semula tradisional menjadi lebih modern dan mampu memberdayakan peserta didik secara lebih efektif. Namun, pada kenyataannya masih banyak praktik pembelajaran yang lebih cenderung menerapkan strategi pembelajaran tradisional daripada modern.⁴⁴ Hal ini kemungkinan berkaitan dengan rendahnya profesionalisme guru dalam mengadopsi dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Tantangan ini menuntut para pendidik untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan membuka diri terhadap metode pembelajaran baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.⁴⁵

Tantangan lain yang dihadapi terletak pada lemahnya infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, serta lemahnya literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik. Selain itu, perlu ada upaya untuk menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Terdapat tantangan lain yang terletak pada pengintegrasian teknologi secara efektif ke dalam proses pembelajaran sambil mempertahankan interaksi manusia yang penting dalam pendidikan. Selain itu, seiring meluasnya penggunaan platform digital untuk pengajaran dan pembelajaran, keamanan data dan privasi pengguna menjadi perhatian penting.⁴⁶

Sejalan dengan uraian tersebut, Maragustam (2018) turut menyetujui uraian tersebut dengan menambahkan bahwa kehadiran teknologi dalam bidang pendidikan menghadirkan sebuah paradoks yang signifikan. Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi justru memicu krisis identitas dan hilangnya pegangan nilai dalam masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari adanya erosi pada empat pilar fundamental: (1) nilai etika dan spiritualitas keagamaan, (2) nilai luhur kebangsaan, (3) nilai *sosio-kultural*, dan (4) filosofi hidup. Konsekuensi negatif dari fenomena ini adalah keempat sumber nilai tersebut tidak hanya termarginalisasi dalam praktiknya, tetapi juga mulai dipandang sebagai hambatan bagi kehidupan modern.

Serupa dengan pandangan Maragustam (2020) dan Dewi (2019) hasil penelitiannya turut memperkaya kajian akan hal ini. Baginya, dominasi teknologi dalam bidang pendidikan menimbulkan dehumanisasi dalam bentuk mentalitas dan pola pikir yang terlalu mengagungkan teknologi di atas segalanya, apalagi semua interaksi dalam proses pendidikan dimainkan oleh mesin dan manusia seperti robot.⁴⁷ Hal inilah yang menimbulkan proses dehumanisasi dan nilai agama, moral, dan budaya semakin lama semakin luntur pada diri pelaku pendidikan terutama peserta didik. Sehingga, pendidikan di era globalisasi saat ini mengalami krisis nilai.⁴⁸ Pendidikan hanya menghasilkan output-output yang pandai secara kognitif, menguasai teori dan teknologi namun kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.⁴⁹ Sehingga dari berbagai kendala tersebut, kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan, serta sektor teknologi diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dan mendorong

⁴⁴ Ni Made Fanny Dianis Sviri and Kadek Dwi Arlinayanti, "Perubahan Paradigma Pendidikan Melalui Pemanfaatan Teknologi Di Era Global," *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2024): 50–63.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Laely Nurhayati, "Pendidikan Profetik Pada Masa Nabi Muhammad SAW: Telaah Historis Transformasi Sosial Melalui Nilai Tauhid, Humanisasi, Dan Liberasi," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 951–56.

⁴⁷ Maragustam Siregar, "Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter," *Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, 2020.

⁴⁸ Wahyu Sihab and Mukhsin Achmad, "Relevansi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan* 3, no. 1 (2025): 237–49, doi:<https://doi.org/10.59031/jkppk.v3i1.559>.

⁴⁹ Eva Dewi, "Potret Pendidikan Di Era Globalisasi Teknosentrisme Dan Proses Dehumanisasi," *Sukma: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 93–116.



lingkungan pendidikan yang lebih inovatif dan juga inklusif.

Diskusi mengenai strategi revitalisasi pendidikan Indonesia perlu didahului dengan pemetaan kondisi faktual pendidikan nasional yang masih menghadapi tantangan multidimensi. Di Indonesia, kualitas pendidikan menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terlebih di daerah 3T. Dalam sebuah literatur disebutkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan di daerah 3T masih menjadi tantangan serius akibat kendala sumber daya dan teknologi. Rendahnya efektivitas pembelajaran di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang kompeten serta kondisi sarana prasarana yang belum layak. Akibatnya, kebijakan pendidikan sulit berjalan optimal karena fondasi dasar seperti ruang kelas dan konektivitas digital belum terpenuhi dengan baik.⁵⁰

Belum lagi ditambah fakta pahit bahwa dalam sejumlah studi asesmen internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak-anak Indonesia yang berusia 15 tahun masih kesulitan dalam menguasai keterampilan dasar membaca dan berhitung. Masih dalam lingkup ujian serupa, pada hasil Asesmen Nasional untuk tahun ajaran 2021/2022 telah mengungkapkan variasi yang signifikan terkait skor kemampuan literasi dan numerasi murid di berbagai wilayah Indonesia. Dalam hasil asesmen tersebut, disebutkan bahwa murid di provinsi Indonesia Timur mendapatkan skor literasi dengan skor rendah dibandingkan dengan murid di pulau Jawa. Hasil ujian tersebut mengindikasikan adanya ketidaksetaraan pendidikan dan perbedaan level capaian pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia masih sangat tinggi.

Wang (2023) dalam hasil penelitiannya memetakan rendahnya capaian pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kombinasi sistem kurikulum yang kaku dan seragam, yang lebih memprioritaskan penuntasan materi (konten) daripada pemahaman mendalam murid, sehingga mengabaikan keragaman kebutuhan belajar dan konteks lokal. Masalah ini diperparah oleh tata kelola pendidikan yang bersifat mendikte (*top-down*) dan terbatasnya akses serta kualitas pelatihan guru yang tidak merata secara geografis, sehingga menghambat inovasi pedagogis.⁵¹ Selain itu, pola pikir pendidik yang terjebak di zona nyaman serta beban administrasi yang sangat berat mengalihkan fokus guru dari menciptakan pembelajaran yang bermakna menjadi sekadar pemenuhan kewajiban birokratis, yang pada akhirnya membuat proses belajar menjadi tidak menarik dan kurang efektif bagi murid.⁵²

Kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia menuntut adanya upaya perbaikan yang konkret demi peningkatan mutu yang berkelanjutan.⁵³ Sehingga diperlukan solusi cepat dan efektif untuk memanfaatkan peluang pembangunan yang komprehensif. Persoalan-persoalan multi aspek tersebut perlu ditangani hingga ke akarnya sebagai kunci keberhasilan dalam mendorong perbaikan lanskap pendidikan nasional secara signifikan. Berdasarkan diagnosis atas permasalahan di atas, strategi mengenai upaya perbaikan pada sistem pendidikan dapat dipetakan ke dalam beberapa hal utama, antara lain;

1. Reformasi Kurikulum

Sebagaimana telah dikritisi oleh Wang (2023) mengenai materi pendidikan dalam kurikulum sebelumnya bersifat seragam, dan implementasi pendidikan pada kurikulum sebelumnya bersifat mendikte sehingga menyebabkan rendahnya inisiatif dan intensif yang dapat melahirkan inovasi.⁵⁴ Dengan berakar pada permasalahan tersebut, diberlakukannya kebijakan Merdeka Belajar dalam proses belajar-mengajar menjadi

⁵⁰ NUR LUTHFIA AYUDHIA et al., "Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T," *GURUKU: JURNAL PENDIDIKAN DAN SOSIAL HUMANIORA Upejume.uu: Politeknik Kampar* 1, no. 4 (2023): 36–46.

⁵¹ Claudia Wang et al., "Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Indonesia," *Kemdikbud* 4, no. 2 (2023): 1–7.

⁵² Ibid.

⁵³ Hani Islami and Abdul Rozak, "Analisis Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan: Studi Evaluasi Atas Tujuh Arah Strategis Pemerintah Dalam RPJMN 2020–2024," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 736–45.

⁵⁴ Wang et al., "Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Indonesia."



sebuah langkah strategis untuk menjawab persoalan ini.

Dalam dokumen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, disebutkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar menggeser tradisi lama yang seragam menuju pendekatan yang lebih beragam dan utuh. Tujuannya agar guru dan siswa leluasa mengeksplorasi ilmu pengetahuan.⁵⁵ Di sini, murid memegang kendali utama agar proses belajar terasa bermakna bagi para siswa.

Oleh karena itu, pembelajaran akan disesuaikan dengan level kemampuan siswa dan didukung teknologi untuk pengalaman yang lebih personal, namun tetap menyeimbangkannya dengan kerja kelompok untuk mengasah solidaritas dan soft skills. Selain pada siswa, Kurikulum Merdeka menekankan pada pemberdayaan guru, memberikan pendidik kebebasan pedagogis yang lebih besar dan kesempatan pengembangan profesional untuk memfasilitasi metode pengajaran yang lebih inovatif.⁵⁶

Literatur lain menjelaskan hal serupa bahwa lahirnya kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kebijakan ini berangkat dari kesadaran bahwa setiap sekolah memiliki karakteristik dan potensi lokal yang unik, sehingga pendekatan yang seragam dianggap kurang relevan. Dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran (*student-centered*), kurikulum ini berupaya menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan personal, menyesuaikan dengan kecepatan serta gaya belajar masing-masing anak. Artinya, sekolah kini memiliki otonomi luas untuk merancang kurikulum yang benar-benar adaptif terhadap kebutuhan siswa dan keunggulan daerahnya.⁵⁷

Nilai kebaruan Kurikulum Merdeka terletak pada visi reformasinya yang menyeluruh, meninggalkan pola lama yang didominasi hafalan dan tes standarisasi. Sebagai gantinya, kurikulum ini menerapkan strategi integratif yang mencakup penguatan nalar kritis, pendidikan STEM, serta metode berbasis proyek. Langkah ini diambil guna melahirkan pelajar yang adaptif terhadap perubahan dunia dan cakap memecahkan masalah.⁵⁸

Dalam konteks ini, reformasi kurikulum menjadi langkah strategis yang melampaui sekadar revisi konten semata. Upaya tersebut melibatkan inovasi fundamental pada metodologi pengajaran serta internalisasi nilai-nilai esensial, seperti kolaborasi dan kreativitas, untuk menjawab tantangan global. Muaranya, pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik dapat berkembang optimal sesuai dengan potensinya.⁵⁹

2. Transformasi Peran Guru

Mutu pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah melampaui kualitas tenaga pengajarnya, hal ini menempatkan guru sebagai titik sentral yang menjadi fondasi keberhasilan dalam sistem pendidikan.⁶⁰ Namun ironisnya, fakta di lapangan mengungkap bahwa peran guru masih didominasi oleh pendekatan konvensional. Pengajaran sering kali hanya terpaku pada penuntasan materi ajar dan minim inovasi dalam penggunaan metode

⁵⁵ Tatang Hidayat and Aceng Kosasih, "Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Pai Di Sekolah," *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 45–69.

⁵⁶ Hunaepi Hunaepi and I. Suharta, "Transforming Education in Indonesia: The Impact and Challenges of the Merdeka Belajar Curriculum," *Path of Science* 10, no. 6 (2024): 5026–39.

⁵⁷ Sutanto Sutanto, "Transformasi Pendidikan Di Sekolah Dasar: Peran Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Di Indonesia," *Jurnal Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2024): 69–76.

⁵⁸ Hunaepi and Suharta, "Transforming Education in Indonesia: The Impact and Challenges of the Merdeka Belajar Curriculum."

⁵⁹ T. Tarso, Deny Hadi Siswanto, and Aldo Setiawan, "Teacher Qualifications in the Implementation of the Kurikulum Merdeka and ISMUBA," *Curricula: Journal of Curriculum Development* 4, no. 1 (2025): 13–28.

⁶⁰ Ida Rohmah Susiani and Nur Diny Abadiyah, "Kualitas Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 8, no. 2 (2021): 292–98.



maupun media, sehingga suasana pembelajaran menjadi kaku dan kurang dinamis.⁶¹

Padahal, tantangan pendidikan kini semakin kompleks seiring dengan perubahan kebijakan nasional, seperti implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan kompetensi dan karakter, serta pesatnya perkembangan teknologi digital. Dinamika ini menuntut adanya transformasi peran guru untuk segera beradaptasi dan mengambil peran baru, bukan lagi sekadar penyampai materi, melainkan sebagai fasilitator yang aktif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa.⁶²

Dalam merespons tuntutan transformasi tersebut, guru harus berani tampil sebagai pionir inovasi. Peran sebagai agen perubahan tidak boleh lagi dimaknai sebatas tugas administratif mengajar di kelas, tetapi harus meluas pada keberanian menggagas perubahan mendasar dalam pendekatan pedagogis. Guru yang berpikir maju (*growth mindset*) tidak akan membatasi diri pada pengajaran tradisional, melainkan senantiasa membuka diri terhadap ide-ide baru serta metode yang lebih adaptif.⁶³

Pada intinya, keberhasilan transformasi ini bergantung pada kecakapan guru dalam melahirkan inovasi pembelajaran yang nyata. Hal ini mencakup pengembangan metode interaktif berbasis proyek serta integrasi teknologi sebagai alat bantu yang efektif untuk mendongkrak partisipasi siswa. Guru juga memegang peran vital dalam mendesain kurikulum yang relevan dengan dunia nyata, sekaligus menerapkan sistem evaluasi holistik yang menilai keterampilan dan karakter siswa, bukan sekadar penguasaan materi semata.⁶⁴

3. Pemerataan Akses Pendidikan

Mutu pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah melampaui kualitas tenaga pengajarnya, hal ini menempatkan guru sebagai titik sentral yang menjadi fondasi keberhasilan dalam sistem pendidikan. Krisis pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) merupakan masalah multidimensi yang mendalam. Selain lokasi geografis yang sulit dijangkau, wilayah ini menghadapi tantangan infrastruktur dan sosial-ekonomi yang signifikan. Dalimunthe (2025) secara spesifik menyoroti kondisi fisik sekolah di daerah 3T yang sering kali memprihatinkan, ketiadaan fasilitas dasar seperti ruang kelas layak, perpustakaan, hingga akses teknologi informasi secara langsung menghambat proses belajar mengajar dan menggerus kualitas pendidikan yang diterima siswa.⁶⁵

Untuk memutus mata rantai permasalahan krusial tersebut, intervensi kebijakan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan membutuhkan pijakan data yang valid. Menjawab urgensi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan platform Rapor Pendidikan sebagai basis data objektif yang memetakan mutu pendidikan nasional. Platform ini berfungsi sebagai alat diagnostik krusial untuk mendeteksi ketimpangan sumber daya antarwilayah secara presisi. Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari perumusan kebijakan yang bersifat asumptif dan sebaliknya, mampu membedah akar masalah pendidikan secara akurat, khususnya di wilayah 3T.⁶⁶

Berpijak pada diagnosis data tersebut, terlihat jelas bahwa strategi mengatasi krisis pendidikan di wilayah 3T tidak dapat dilakukan dengan sekadar menyalin sistem dari kota. Data menunjukkan adanya disparitas kondisi sosial yang unik, sehingga menuntut

⁶¹ Dame Triulina Hutasoit, "Guru Penggerak Sebagai Agen Transformasi Pendidikan: Tinjauan Literatur Terhadap Peran, Tantangan, Dan Kolaborasi," *JURNAL PENDIDIKAN MIPA* 15, no. 2 (2025): 551–61, doi:<https://doi.org/10.37630/jpm.v15i2.2719>.

⁶² Nursakinah Nursakinah, Erlin Sulistian, and Muhammad Muhammad, "Transformasi Peran Guru Sekolah Dasar Sebagai Fasilitator Pembelajaran Abad Ke-21," *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial* 6, no. 2 (2025): 289–95.

⁶³ Arif Surya Volta and Atika Cahya Fajriyati Nahdiyah, "Transformasi Pendidikan Di Era 4.0: Intelektualitas Guru Tercipta Kualitas Sekolah Terjaga," *Jurnal Kepengawasan, Supervisi Dan Manajerial (JKSM)* 1, no. 4 (2023): 143–51.

⁶⁴ Nursakinah, Sulistian, and Muhammad, "Transformasi Peran Guru Sekolah Dasar Sebagai Fasilitator Pembelajaran Abad Ke-21."

⁶⁵ Muhammad Fitrah Dalimunte, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, "Mengungkap Sumber Pengetahuan : Harmoni Antara Akal , Indera , Intuisi , Dan Wahyu" 3, no. 3 (2024): 93–100, doi:10.57251/hij.v3i3.1477.

⁶⁶ Tuti Budirahayu, "MENGAGAS REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA: TINJAUAN KRITIS SOSIOLOGI PENDIDIKAN," 2024.



pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Kebijakan harus didesain agar relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat serta menghormati nilai lokal setempat. Pendekatan berbasis konteks inilah yang menjamin program pemerintah tidak dianggap asing, melainkan dapat berjalan efektif dan diterima baik oleh warga sebagai solusi yang tepat sasaran.⁶⁷

Sebagai manifestasi nyata dari strategi afirmatif tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggulirkan program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjamin akses layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak yang selama ini terhambat oleh kendala geografis maupun ekonomi.⁶⁸ Secara spesifik, sasaran utamanya mencakup putra-putri asli Papua, anak-anak di daerah khusus (3T), serta anak-anak pekerja migran (*Repatriasi*). Hingga saat ini, tercatat sekitar 4.616 pelajar dari kelompok sasaran tersebut telah mendapatkan akses pendidikan melalui skema ini.⁶⁹

Mekanisme pelaksanaan ADEM dilakukan secara terstruktur, dimulai dari tes potensi akademik, pemilihan sekolah, hingga pembekalan mental sebelum keberangkatan. Misi utama program ini bukan sekadar memindahkan siswa, melainkan memberikan akses pendidikan berkualitas di sekolah-sekolah unggulan.⁷⁰ Harapannya, para lulusan ini kelak memiliki kompetensi unggul untuk kembali membangun kampung halamannya, sekaligus menjadi agen yang mengikis kesenjangan kemajuan antarwilayah di Indonesia.⁷¹ Demi memastikan kualitas pembelajaran pada para penerima program ADEM ditempatkan di berbagai SMA/SMK mitra terbaik lintas provinsi, dengan rincian persebaran sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel penerima program ADEM lintas provinsi

No	Wilayah ADEM	Penempatan Sekolah
1	ADEM Wilayah Papua	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali
2	ADEM Daerah Khusus	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara
3	ADEM Repatriasi	Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali

⁶⁷ Dalimunte, Islam, and Sumatera, “Mengungkap Sumber Pengetahuan : Harmoni Antara Akal , Indera , Intuisi , Dan Wahyu.”

⁶⁸ “Siaran Pers: Satu Tahun Kemendikdasmen Wujudkan Arah Asta Cita Presiden Melalui Pendidikan Bermutu Untuk Semua,” *Kemendikdasmen*, October 24, 2025, <https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/13940-satu-tahun-kemendikdasmen-wujudkan-arah-asta-cita-presiden-m>.

⁶⁹ “Panduan Pendaftaran Afirmasi Pendidikan Menengah,” *Pusat Informasi ULT*, December 3, 2024, <https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/40681331852953-Panduan-Pendaftaran-Afirmasi-Pendidikan-Menengah>.

⁷⁰ Ratna Siwi Widayanti, “Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat Dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Media Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2021): 290–310.

⁷¹ “Informasi Umum Program Afirmasi,” *Pusat Informasi ULT*, December 3, 2024, <https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/40660390807065-Info-rmasi-Umum-Program-Afirmasi>.



KESIMPULAN

Evaluasi sistem pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan antara kebijakan pusat dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Meskipun pemerintah telah merancang berbagai kebijakan strategis seperti Kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter, implementasinya sering terhambat oleh infrastruktur sekolah yang tidak memadai, distribusi sumber daya yang timpang, serta ketidaksinkronan data antar lembaga. Masalah ini diperberat oleh rendahnya kualitas dan kapasitas tenaga evaluator, di mana banyak guru dan kepala sekolah masih kesulitan menerapkan penilaian autentik dan modern akibat pelatihan yang minim. Selain itu, evaluasi pendidikan karakter yang seharusnya vital justru kerap berakhir sebagai formalitas administrasi semata karena ketiadaan instrumen penilaian yang baku dan pemahaman guru yang terbatas mengenai aspek multidimensi karakter siswa.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, strategi perbaikan difokuskan pada reformasi kurikulum yang lebih fleksibel, transformasi peran guru, dan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan "*Merdeka Belajar*" digulirkan untuk menggeser pola pendidikan seragam menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan relevan dengan konteks lokal, serta menekankan nalar kritis daripada sekadar hafalan. Peran guru pun didorong untuk berubah dari pengajar konvensional menjadi agen inovasi yang adaptif terhadap teknologi dan metode pedagogis baru. Pemerintah juga melakukan intervensi melalui kebijakan afirmatif, seperti program beasiswa ADEM, guna menjamin akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah tertinggal yang selama ini terkendala faktor geografis dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Armini, Ni Kadek. "Evaluasi Metode Penilaian Perkembangan Siswa Dan Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 98–112.
- AYUDHIA, NUR LUTHFIA, PUTRI WAHIDDIYAH NABILA, SAFITRI DESY, and Sujarwo Sujarwo. "Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T." *GURUKU: JURNAL PENDIDIKAN DAN SOSIAL HUMANIORA Ycpedume.uu: Politeknik Kampar* 1, no. 4 (2023): 36–46.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). "Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan | Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan | Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah*, March 27, 2024. <https://bskap.kemdikbud.go.id/berita-detail/85?utm>.
- Budirahayu, Tuti. "MENGAGAS REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA: TINJAUAN KRITIS SOSIOLOGI PENDIDIKAN," 2024.
- Dalimunte, Muhammad Fitrah, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Mengungkap Sumber Pengetahuan : Harmoni Antara Akal , Indera , Intuisi , Dan Wahyu" 3, no. 3 (2024): 93–100. doi:10.57251/hij.v3i3.1477.
- Damayanti, Desy, and Ahmad Khairul Nuzuli. "Evaluasi Efektivitas Penggunaan Teknologi Komunikasi Dalam Pengajaran Metode Pendidikan Tradisional Di Sekolah Dasar." *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 208–19.
- Dewi, Eva. "Potret Pendidikan Di Era Globalisasi Teknosentrisme Dan Proses Dehumanisasi." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 93–116.
- Emily Zakia Emily Zakia. "Pendidikan di Indonesia Belum Merata, Begini Sebaran Sekolah Menurut BPS - GoodStats," Oktober pukul 19.20 WIB 2025. <https://goodstats.id/article/sebaran-sekolah-di-indonesia-masih-belum-merata-ini-datanya-wUWy1?utm>.
- Fauzi, Imam-, Imam Syafe'i, and Amiruddin Amiruddin. "Character Education: Its



- Implementation at Islamic Boarding School | Journal of Advanced Islamic Educational Management,” May 31, 2023. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/JAIEM/article/view/15797?utm>.
- Frisnoiry, Suci. “Transformasi Pendidikan Menuju Literasi Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Peluang.” *Jurnal Pendidikan Matematika Malikussaleh* 4, no. 1 (2024): 53–63.
- Gultom, Yosafat Maheswara, Fachri Syahputra, and Syahril Syahril. “Pengaruh Evaluasi Pembelajaran Terhadap Kualitas Pembelajaran Guru Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 3 (May 31, 2024): 8–8. doi:10.47134/pgsd.v1i3.543.
- Haryono, Eko. “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *An-Nuur* 13, no. 2 (2023). doi:<https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>.
- Hidayat, Tatang, and Aceng Kosasih. “Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Pai Di Sekolah.” *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 45–69.
- Hunaepi, Hunaepi, and I. Suharta. “Transforming Education in Indonesia: The Impact and Challenges of the Merdeka Belajar Curriculum.” *Path of Science* 10, no. 6 (2024): 5026–39.
- Husna, Faizatul, and Desi Ratna Sari. “Teacher As Researcher: Exploring Competencies And Challenges Of Urban And Rural English School Teachers In Aceh.” *Journal of English Language and Education* 9, no. 4 (July 31, 2024): 59–69. doi:10.31004/jele.v9i4.530.
- Hutasoit, Dame Triulina. “Guru Penggerak Sebagai Agen Transformasi Pendidikan: Tinjauan Literatur Terhadap Peran, Tantangan, Dan Kolaborasi.” *JURNAL PENDIDIKAN MIPA* 15, no. 2 (2025): 551–61. doi:<https://doi.org/10.37630/jpm.v15i2.2719>.
- Pusat Informasi ULT. “Informasi Umum Program Afirmasi,” December 3, 2024. <https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/40660390807065-Info-Program-Afirmasi>.
- Islami, Hani, and Abdul Rozak. “Analisis Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan: Studi Evaluasi Atas Tujuh Arah Strategis Pemerintah Dalam RPJMN 2020–2024.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 736–45.
- Kesuma, Dharma. *Pendidikan Karakter: Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Marlina, Yayu Asih, Yusuf Tri Herlambang, and Tatang Muhtar. “Urgensi Pendidikan Karakter Berbasis Pedagogik Profetik: Sebuah Pendekatan dalam Menanggulangi Krisis Moral Siswa.” *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 10, no. 1 (January 12, 2025): 753–58. doi:10.51169/ideguru.v10i1.1424.
- Mochtar, Rodhinal, and Eka Diana. “Strategi Supervisi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Lembaga Pendidikan.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 395–407.
- Nisa, Khairun, Nurhasanah Nurhasanah, Anindita Suliya Hangesti Mandra Kusuma, Deni Sutisna Deni Sutisna, and Mega Puspita Sari. “Pengembangan Instrumen Penilaian Karakter Untuk Siswa Sekolah Dasar (SD).” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 6, no. 1 (2021): 102–7.
- Nudin, Burhan, Wahyu Sihab, Nofri Aldinata, and Muhammad Daffa Imaduddin. “The Role Of Parents And Families In Children’s Education In The Digital Era.” *Linguanusa: Social Humanities, Education and Linguistic* 2, no. 1 (2024): 9–22.
- Nurfaizin, Fikrial, and Arif Fakhir Firdaus. “Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.” *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 2 (June 13, 2025): 310–18. doi:10.51878/manajerial.v5i2.5384.
- Nurhayati, Laely. “Pendidikan Profetik Pada Masa Nabi Muhammad SAW: Telaah Historis Transformasi Sosial Melalui Nilai Tauhid, Humanisasi, Dan Liberasi.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 951–56.
- Nursakinah, Nursakinah, Erlin Sulistian, and Muhammad Muhammad. “Transformasi Peran



- Guru Sekolah Dasar Sebagai Fasilitator Pembelajaran Abad Ke-21.” *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial* 6, no. 2 (2025): 289–95.
- Oktafiana, Riska, Fathiyani Fathiyani, and Musdalifah Musdalifah. “Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan.” *Jurnal Mappesona* 3, no. 3 (2020).
- Pusat Informasi ULT. “Panduan Pendaftaran Afiriasi Pendidikan Menengah,” December 3, 2024.
<https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/40681331852953-Panduan-Pendaftaran-Afiriasi-Pendidikan-Menengah>.
- Praekanata, I. Wayan Indra, Ni Putu Erna Surim Virnayanthi, Eliska Juliangkary, and I. Gede Ratnaya. *Menelusuri Arab Pendidikan: Dinamika Dan Inovasi Kurikulum Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Purnamasari, Ita, St Asriati, and Herlina Daddi. “Analyzing Teachers’ Implementation of Authentic Assessment in English Lesson at SMKN 4 Bulukumba.” *Journal of Language Testing and Assessment* 3, no. 1 (June 30, 2023): 11–19. doi:10.56983/jlta.v3i1.206.
- Radnasari, Devi, and Siti Fatonah. “Obstacles and Challenges in Implementing Authentic Assessment in Elementary Madrasah.” *International Journal of Basic Educational Research* 2, no. 1 (February 28, 2025): 21–25. doi:10.14421/ijber.v2i1.8800.
- Rambe, Anggi, Regita Dwietama, Muhammad Arya, Endis Firdaus, and Rini Rahman. “Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum 2013.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 21 (October 31, 2024): 238–49. doi:10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21(2).16354.
- RI, Elvira Wanda, Naufali Farhanillah, and Akhmad Affandi. “Evaluasi Pembelajaran Karakter Di Sekolah.” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 9 (2025): 11062–71.
- Salirawati, Das. “Identifikasi Problematika Evaluasi Pendidikan Karakter Di Sekolah.” *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains* 4, no. 1 (2021): 17–27.
- . “Identifikasi Problematika Evaluasi Pendidikan Karakter Di Sekolah.” *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains* 4, no. 1 (April 1, 2021): 17–27. doi:10.24246/juses.v4i1p17-27.
- Satryo Soemantri Brodjonegoro,. “Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi,” February 20, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/angka-partisipasi-kasar-pendidikan-tinggi?utm>.
- Kemendikdasmen. “Siaran Pers: Satu Tahun Kemendikdasmen Wujudkan Arah Asta Cita Presiden Melalui Pendidikan Bermutu Untuk Semua,” October 24, 2025. <https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/13940-satu-tahun-kemendikdasmen-wujudkan-arah-asta-cita-presiden-m>.
- Sihab, Wahyu, and Mukhsin Achmad. “Relevansi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan* 3, no. 1 (2025): 237–49. doi:<https://doi.org/10.59031/jkppk.v3i1.559>.
- Siregar, Maragustam. “Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter.” *Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, 2020.
- Suherman, Agus, Yudi Firmansyah, and Suherman Suherman. “Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dan Efisien Dalam Pendidikan Di Era 5.0.” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 2066–73.
- Susiani, Ida Rohmah, and Nur Diny Abadiyah. “Kualitas Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia.” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 8, no. 2 (2021): 292–98.
- Sutanto, Sutanto. “Transformasi Pendidikan Di Sekolah Dasar: Peran Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Di Indonesia.” *Jurnal Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2024): 69–76.
- Svari, Ni Made Fanny Dianis, and Kadek Dwi Arlinayanti. “Perubahan Paradigma Pendidikan Melalui Pemanfaatan Teknologi Di Era Global.” *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2024): 50–63.



- Syarbini, Amirulloh. *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Sylvia, Ike, Syafri Anwar, and Khairani Khairani. “Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik Berbasis Pendekatan Authentic Inquiry Learning Pada Mata Pelajaran Sosiologi Di Sekolah Menengah Atas.” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 2 (December 31, 2019): 103–20. doi:10.24036/scs.v6i2.162.
- Taali, Muhammad, Arif Darmawan, and Ayun Maduwinarti. *Teori Dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Tarso, T., Deny Hadi Siswanto, and Aldo Setiawan. “Teacher Qualifications in the Implementation of the Kurikulum Merdeka and ISMUBA.” *Curricula: Journal of Curriculum Development* 4, no. 1 (2025): 13–28.
- Tri Meilani Ameliya. “Memperjuangkan Pendidikan Yang Setara Di Daerah 3T - ANTARA News,” Rabu, Mei 13:36 WIB 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4832069/memperjuangkan-pendidikan-yang-setara-di-daerah-3t?utm>.
- Volta, Arif Surya, and Atika Cahya Fajriyati Nahdiyah. “Transformasi Pendidikan Di Era 4.0: Intelektualitas Guru Tercipta Kualitas Sekolah Terjaga.” *Jurnal Kepengawasan, Supervisi Dan Manajerial (JKSM)* 1, no. 4 (2023): 143–51.
- Wang, Claudia, Monique Zhang, Ali Sesunan, and Laurencia Yolanda. “Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Indonesia.” *Kemdikbud* 4, no. 2 (2023): 1–7.
- Widayanti, Ratna Siwi. “Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat Dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Media Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2021): 290–310.
- Winaryo, Slamet. “Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Dan Terakses Jenjang Pendidikan Dasar Di Provinsi Kalimantan Tengah.” *Equity In Education Journal* 2, no. 1 (March 20, 2020): 1–10. doi:10.37304/eej.v2i1.1679.
- Yam, Jim Hoy. “Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian.” *EMPIRE* 4, no. 1 (2024): 61–71. doi:<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/EM/article/view/4730?utm>.
- Yusni, Diana, Yayan Sanjaya, Kusnadi Kusnadi, Nurhamidah Nurhamidah, and Waliyyatu Azzahra. “Analyze the Crisis of Students’ Character Values and Innovative School Strategies in Overcoming the Challenge.” *The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences*, July 1, 2024, 52–60. doi:10.55549/epess.791.
- Yusri, Nadia, Muhammad Afif Ananta, Widya Handayani, and Nurul Haura. “Peran Penting Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islami.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 12–12.
- Zamroni, Mohammad. *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. IRCISOD, 2022. doi:https://books.google.co.id/books/about/Filsafat_Komunikasi.html?id=ialcEAAAQBAJ&redir_esc=y.

